

## ANALISIS EKONOMI POLITIK : STUDI KASUS PROYEK FOOD ESTATE MENUJU KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

### *POLITICAL ECONOMY ANALYSIS: A CASE STUDY OF FOOD ESTATE PROJECTS TOWARDS FOOD SECURITY IN INDONESIA*

Ariani Nur Hamdiah<sup>1)\*</sup>, Maharani Citra Tjahjana<sup>2)</sup>, Afrian Bekt Aliansyah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117,  
[10020121037@student.uinsby.ac.id](mailto:10020121037@student.uinsby.ac.id)

<sup>2)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117,  
[10020121051@student.uinsby.ac.id](mailto:10020121051@student.uinsby.ac.id)

<sup>3)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No. 117, [10020141070@student.uinsby.ac.id](mailto:10020141070@student.uinsby.ac.id)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi ekonomi politik dalam konteks proyek Food Estate sebagai upaya menuju ketahanan pangan di Indonesia. Melalui studi kasus mendalam, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara aktor-aktor politik, kebijakan ekonomi, dan dampaknya terhadap sektor pertanian, dengan fokus pada proyek Food Estate yang menjadi salah satu inisiatif utama pemerintah. Metodologi penelitian melibatkan analisis kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan penelusuran literatur untuk memahami dinamika ekonomi politik di sekitar proyek Food Estate. Temuan penelitian ini mengungkap faktor-faktor ekonomi politik yang memengaruhi perencanaan, implementasi, dan hasil dari proyek tersebut. Hasil analisis menyoroti sejumlah isu, termasuk distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dampak terhadap masyarakat lokal, serta keterlibatan sektor swasta dalam proyek tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang mendukung ketahanan pangan, termasuk insentif bagi para petani dan upaya peningkatan infrastruktur. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara ekonomi dan politik dalam konteks proyek Food Estate di Indonesia. Implikasi temuan ini dapat membantu pemerintah, praktisi, dan akademisi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pembangunan Ekonomi, Kebijakan Keberlanjutan, Kesejahteraan

**ABSTRACT:** This research aims to analyze the political economy dimension in the context of the Food Estate project as an effort towards food security in Indonesia. Through an in-depth case study, this research explores the interaction between political actors, economic policies and their impact on the agricultural sector, with a focus on the Food Estate project, which is one of the government's key initiatives. The research methodology involved policy analysis, stakeholder interviews and literature searches to understand the political economy dynamics surrounding the Food Estate project. The findings reveal the political economy factors that influenced the planning, implementation and outcomes of the project. The analysis highlights a number of issues, including the distribution of power between the central and local governments, the impact on local communities, and the involvement of the private sector in the project. It also evaluates the effectiveness of economic policies that support food security, including incentives for farmers and efforts to improve infrastructure. The research provides deep insights into the complex relationship between economics and politics in the context of food estate projects in Indonesia. The implications of the findings can assist the government, practitioners and academics in designing more effective policies to achieve food security and improve people's welfare.

**Keywords:** Economic Development, Sustainability Policy, Welfare

## A. PENDAHULUAN

Analisis ekonomi politik merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan wawasan ilmu politik dan ekonomi untuk memahami hubungan antara institusi politik, kebijakan ekonomi, dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian suatu negara. Jenis analisis ini sering diterapkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis institusi politik suatu negara, seperti bentuk pemerintahan, sistem pemilu, dan kerangka hukum, sangatlah penting. Lembaga-lembaga ini membentuk lingkungan politik dan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Menelaah kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, dan kerangka peraturan, membantu menilai bagaimana pemerintah mempengaruhi hasil perekonomian.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres menyatakan bahwa saat ini masyarakat global berada di ambang krisis pangan akut setidaknya hingga 50 tahun ke depan. “Sangat jelas bahwa terdapat darurat pangan global yang, jika tidak ditangani secara efisien, akan berdampak jangka panjang pada jutaan anak dan orang tua. Tindakan diperlukan sekarang untuk menghindari skenario terburuk selama kondisi pandemi,” kata dia. Antonio pada Juni 2020.

Peringatan FAO mengenai ancaman krisis pangan pada tahun-tahun mendatang mendapat perhatian cukup besar dari Indonesia. Sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, Indonesia tidak lepas dari ancaman krisis pangan global. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan konsumsi pangan khususnya bahan pokok seperti beras, singkong dan sorgum. Selain sebagai negara tropis, Indonesia juga harus menghadapi ancaman perubahan iklim, seperti musim kemarau panjang. Kedua kondisi ini diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor pertanian kehilangan kendali. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mengambil tindakan nyata untuk menjaga ketahanan pangan di tengah kondisi yang tidak menentu ini.

Kebijakan terhadap beras sebagian diwujudkan dalam keberadaan dan amanah BULOG. Badan ini telah ditugaskan sejak akhir tahun 1960-an untuk mencapai harga dasar beras yang ditentukan oleh kebijakan, dengan menggunakan instrumen kontrol monopoli atas perdagangan, pembiayaan pemerintah, pengadaan dalam negeri, dan fasilitas penyimpanan musiman (Bank Dunia, 2008b). Kegiatan tersebut dinilai penting dalam pencapaian ketahanan pangan Indonesia dan garda terdepan dalam upaya tersebut adalah swasembada beras. Tujuan ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras. Namun semakin diperlukan reformasi dalam pendekatan ini untuk mencapai ketahanan pangan. Reformasi di sini tidak hanya menyangkut struktur dan operasional BULOG tetapi juga tingkat harga beras dan bias harga hasil panen terhadap beras. Pencarian alternatif terhadap kebijakan beras mahal saat ini dimulai sejak pertengahan tahun 1990an, menuju impor beras yang lebih besar untuk menjamin ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas dalam negeri dalam penanaman beras. Hal terakhir ini memerlukan investasi yang lebih besar pada infrastruktur pedesaan, lebih banyak penelitian pertanian, dan perbaikan berkelanjutan pada pasar modal pedesaan.

Politisasi Isu Pangan Indonesia berusaha membersihkan diri dari sampah-sampah politisasi pangan untuk mewujudkan politik pangan yang beretika, santun dan sangat sulit dilakukan. Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia mengenai food estate pada food farm, menghindari hambatan-hambatan yang prinsipil, memfasilitasi proses dalam bidang, dasar hukum dan mewujudkan komunikasi yang baik. Djuyandi (2017) juga mengemukakan keprihatinannya mengenai pentingnya komunikasi sosial yang dilakukan oleh pihak militer untuk mencapai tujuannya dalam memperkuat keamanan.

Program food estate sebaiknya menggunakan dan mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh FAO (Food Agricultural Organization), sebuah organisasi pangan dan pertanian internasional yang dibentuk oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian di Kalimantan Barat (120.000 ha), Kalimantan Tengah (180.000 ha), Kalimantan Timur (10.000 ha), dan Maluku (190.000 ha). Keterlibatan TNI dalam Food Estate sebagai motivator, fasilitator, dinamisator, dan inovator dibekali dengan pengetahuan tentang pembibitan, penanaman,

pemupukan, dan pengetahuan praktis ketika timbul permasalahan kebutuhan pupuk, benih, irigasi, atau permasalahan lainnya, catatan dan laporan TNI. secara bertahap kepada pihak yang berwenang.

Pembangunan food estate diharapkan dapat menyumbang sebagian besar kebutuhan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan di tahun mendatang. Krisis pangan menjadi salah satu ancaman yang paling mengkhawatirkan, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan dampaknya berpotensi merambah ke sektor vital lainnya. Hingga pelaksanaan penelitian ini, Kementerian Pertanian telah menjamin ketersediaan cadangan pangan Indonesia yang dinilai cukup stabil. Hingga pelaksanaan penelitian ini, Kementerian Pertanian telah menjamin ketersediaan cadangan pangan Indonesia yang dinilai cukup stabil. Kementerian Pertanian memperkirakan surplus beras sebesar 7,6 juta ton pada bulan Desember, sehingga total cadangan beras menjadi 17. Juta ton sementara tingkat konsumsi akan mencapai sekitar 10 juta ton . Namun Indonesia tidak bisa mengabaikan fakta kondisi global yang tidak menentu, terutama pascapandemi Covid-19 dan peringatan dari FAO. Proyek food estate besar ini dinilai cukup ambisius mengingat besarnya dana dan perencanaan yang dialokasikan. Bahkan, food estate masuk sebagai salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024. Namun permasalahan krisis pangan terus berlanjut ketika kondisi produksi pangan sedang tinggi namun sebagian besar penduduk masih kekurangan pangan dan tidak mudah mengakses pangan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menganalisis suatu program pemerintah yang bernama Food Estate. Peneliti bermaksud untuk menganalisis apa saja dampak dengan adanya kebijakan Food Estate ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan paradigma interpretatif karena bertujuan untuk memahami suatu peristiwa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami urgensi strategi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan food estate sebagai respons terhadap ancaman krisis pangan. Krisis pangan dinilai sangat merugikan Indonesia terutama dari segi perekonomian karena berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, serta menimbulkan gangguan kesehatan atau gizi buruk pada anak-anak dan orang dewasa. Kajian ini memandang krisis pangan sebagai ancaman non-tradisional yang akan melanda Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis ekonomi politik merupakan pengembangan dari studi ekonomi politik, sebuah kajian yang menekankan keterkaitan persoalan ekonomi dalam segala macam dinamikannya yang selama ini menekankan pada kekuatan pasar kemudian direformulasikan menjadi bagian dari persoalan kebijakan pemerintah atau negara. Kebijakan negara yang fundamental dalam pengembangan ekonomi dan intervensi pasar merupakan perdebatan panjang dari keberadaan dan kekuatan pasar yang selama ini dianggap sudah stabil dan efisien seakan tidak tersentuh oleh kekuasaan (politik) atau entitas di luar pasar yang disebut “negara”.

### **Program Food Estate dalam Ketahanan Pangan Indonesia**

Indonesia adalah negara agraris. Sektor pertanian Indonesia menyumbang 14% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2007. Indonesia juga dikenal sebagai produsen dan eksportir beras, kelapa sawit, kopi, karet, kakao, rempah-rempah (kayu manis, pala, cengkeh). Saat ini, situasi pandemi mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selain menjaga pembangunan ekonomi dan penanganan Covid-19. Sebagai negara agraris yang besar, Indonesia mempunyai strategi untuk menjamin ketahanan pangannya dengan membangun food estate nasional di dua lokasi yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang Kalimantan Tengah dan secara bertahap akan diterapkan di provinsi lainnya. Food estate merupakan sebuah konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dalam satu kawasan tertentu, antara lain dari sisi perkebunan, pertanian,

hingga peternakan. Yang membedakannya adalah keterlibatan teknologi digital dan prinsip keberlanjutan yang akan diterapkan selama pembangunan food estate.

Food estate merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Sementara itu, lumbung baru ini juga merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 hingga 2024. Hasil produksi pangan dari food estate ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga memenuhi kebutuhan pasar internasional. Di sisi lain, food estate lebih pada menyimpan cadangan pangan untuk digunakan dalam situasi darurat. Di tingkat masyarakat, cadangan pangan disimpan untuk menghadapi ancaman kekeringan dan bencana alam. Efektivitas penyimpanan pangan seringkali diintervensi oleh pemerintah melalui BULOG dan kebijakan pangan murah lainnya.

Dalam hal ini pemerintah menggunakan konsep food estate sebagai suatu sistem penanaman produk pangan terpadu pada suatu kawasan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan nasional serta sebagai tempat penyimpanan cadangan di food estate untuk keperluan darurat dan ekspor.

Kasus keracunan pangan terjadi akibat penambahan bahan tambahan pangan yang tidak terukur, pengolahan pangan akibat Racun pada bahan pangan menjadi sangat berbahaya. Kadar formalin bersifat karsinogenik dalam jangka panjang, sehingga menimbulkan toksisitas pada makanan yang sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal dalam hitungan jam. Kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional pada tahun 2021 mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun infrastruktur dan memanfaatkan teknologi. Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan melalui pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi pada pertanian skala kecil. Kebijakan Kementerian Pertanian melalui program optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan sarana bertani, serta penataan sumber daya manusia (SDM).

Satu proyek Food Estate yang cukup dikenal adalah proyek Food Estate di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang diumumkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai. Proyek ini juga melibatkan investasi dalam infrastruktur irigasi, teknologi pertanian modern, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Namun, proyek Food Estate juga menuai beberapa kritik terkait dampak lingkungan, hak tanah masyarakat lokal, dan keberlanjutan jangka panjang. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa proyek ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat lokal, dan tidak selalu mencapai tujuan swasembada pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti juga mengambil data dari beberapa narasumber untuk menganalisis program *food estate* dalam ketahanan pangan Indonesia. Narasumber berikut adalah Bapak Anas Fakhruddin selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam.

Program *food estate* adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan nasional dengan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan. Program ini melibatkan pengembangan lahan pertanian, teknologi pertanian, dan berbagai aspek lainnya untuk mencapai tujuan ketahanan pangan. Program ini melibatkan pengembangan lahan pertanian, penerapan teknologi pertanian modern, dan optimalisasi penggunaan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Food Estate juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun program ini mendapat tanggapan beragam, pemerintah terus berupaya menjalankan dan mengoptimalkan Food Estate sebagai upaya strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Food Estate juga menitikberatkan pada diversifikasi produk pertanian dan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan agroindustri. Program ini mengintegrasikan seluruh rantai nilai dari

produksi hingga distribusi, termasuk pemrosesan dan pemasaran produk pertanian. Dengan membangun infrastruktur yang mendukung seperti irigasi modern, pusat-pusat pengolahan, dan sarana transportasi yang efisien, Food Estate berupaya menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan dapat bersaing di pasar global. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi pertanian, dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Aniek Nurhayati selaku Dosen Fisip Uinsa dengan pertanyaan Bagaimana program ini mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan? Analisis dampak terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar. Program Food Estate diharapkan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan mengintegrasikan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup penerapan metode pertanian organik, penggunaan teknologi pertanian yang efisien sumber daya, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, program ini seharusnya memperhatikan keseimbangan ekosistem lokal, memastikan bahwa aktivitas pertanian tidak merusak ekosistem alami atau mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Dalam perencanaan dan implementasi, penting untuk melibatkan para ahli lingkungan, petani lokal, dan komunitas setempat guna memastikan bahwa aspek-aspek keberlanjutan diperhatikan dengan cermat dan berdampak positif pada lingkungan sekitar.

Program food estate mencoba mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip agroekologi dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Dalam perencanaan dan implementasinya, program ini berusaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Langkah-langkah konkret, seperti penerapan praktik pertanian organik, pengelolaan air yang efisien, dan pelestarian keanekaragaman hayati, menjadi fokus dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, program ini juga berupaya untuk memanfaatkan teknologi pertanian terkini yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik irigasi pintar, untuk meningkatkan hasil tanaman tanpa merusak ekosistem sekitar.

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin sektor unggulan dalam proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah seluas 20.704 hektare yang kini mencapai 5.840 hektare. Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare merupakan bantuan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan TNI dalam pembukaan lahan untuk pengembangan lumbung pangan yang dapat menggerakkan TNI untuk membuka lahan. Ketahanan pangan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan "Pertahanan negara dilaksanakan melalui upaya membangun dan membina kemampuan, daya tahan negara dan bangsa, serta penanggulangan setiap ancaman" dari ancaman militer, non-militer dan militer hibrida. Kebijakan sebagai salah satu Program Strategis Negara ini melibatkan peran aktif TNI dan POLRI dalam menyikapi krisis pangan yang akan terjadi.

Realisasi food estate dilakukan di lahan rawa yang dinilai sudah mulai berproduksi namun hasilnya masih rendah. Ada beberapa sektor yang akan ditingkatkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yaitu sarana dan prasarana pertanian, penggunaan benih unggul dan pupuk yang sesuai, serta tanaman obat-obatan. Selain itu, program food estate akan melibatkan teknologi modern dan digital dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. menyerap tenaga kerja dan arus migrasi yang besar ke Kalimantan Tengah. Pengembangan food estate dilakukan di Kalimantan Tengah seluas 190 ribu hektar, Kalimantan Barat 120 ribu hektar, Kalimantan Timur 10 ribu hektar, Maluku 190 ribu hektar, dan Papua 1,9 juta hektar. Menteri Pertahanan Prabowo menjelaskan hingga saat ini, terdapat 4 negara yang berminat berinvestasi, yaitu Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan Qatar. Hal ini dapat dilihat sebagai potensi kerjasama luar negeri di bidang pangan dan teknologi. Dalam perkembangannya, Menhan Prabowo juga menjelaskan akan ada dua fokus penanaman yaitu padi yang dilakukan Kementerian Pertanian dan singkong yang dilakukan Kementerian Pertahanan pada awal tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek food estate merupakan program pemerintah yang berupaya memadukan kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam satu kawasan. Proyek food estate masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 berdasarkan payung hukum Perpres No 58 Tahun 2018. PSN ditetapkan sebagai program pembangunan infrastruktur strategis pada masa pemerintahan Jokowi dengan total 89 proyek baru senilai Rp 1,422 triliun. Food estate memakan porsi anggaran PSN yang cukup besar. Pemerintah mengalokasikan setidaknya Rp 104,2 triliun pada tahun 2021 untuk sektor ketahanan pangan, termasuk pengembangan food estate. 36 Anggaran ini ditujukan untuk bidang ketahanan pangan, khususnya pada pengembangan sarana dan teknologi serta revitalisasi sistem pangan nasional. Food estate tersebut akan mengembangkan lahan alluvial seluas 165.000 ha untuk budidaya padi dan 60.000 ha untuk budidaya singkong. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penanaman padi seluas 32.000 ha, peningkatan aksesibilitas kawasan, dan perbaikan saluran irigasi pada Oktober 2020. Keseluruhan proses awal ditargetkan selesai pada tahun 2021 sehingga proses penanaman secara utuh dapat terlaksana. keluar pada tahun 2021. Mentan optimis produktivitas padi di kawasan food estate bisa mencapai 4-5 ton per ha.

Selain itu, program food estate juga memperhatikan partisipasi aktif masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan memahami kebutuhan dan pandangan masyarakat setempat, program ini berupaya menciptakan model pertanian yang berkelanjutan secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Dengan demikian, food estate tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk generasi yang akan datang.

#### **D. KESIMPULAN**

Analisis ekonomi politik terhadap proyek Food Estate sebagai upaya menuju ketahanan pangan di Indonesia mengungkap berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan dan dampak proyek tersebut. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial saling terkait dalam membentuk dinamika proyek Food Estate. Meskipun proyek ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan, terdapat tantangan signifikan seperti konflik kepentingan, alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan dampak lingkungan. Analisis ekonomi politik juga menyoroti adanya dinamika kekuasaan dan pengaruh aktor politik yang memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi proyek ini. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas proyek Food Estate dan mencapai tujuan ketahanan pangan secara berkelanjutan di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Barichello, Richard & Patunru, Arianto. (2009). Agriculture in Indonesia: Lagging performance and difficult choices. *Choices*, Volume 24 Nomor 2.
- Dahlan A. & Wildan M. (2021). *Ekonomi Politik Analisis Kebijakan Kawasan Industri halal (KIH) dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021*. Yogyakarta : Kalimedia.
- Lasminingrat, Lula & Efriza. Desember 2020, "THE DEVELOPMENT OF NATIONAL FOOD ESTATE: THE INDONESIAN FOOD CRISIS ANTICIPATION STRATEGY", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 10 Nomor 3.
- <https://repository.uinsaizu.ac.id/19311/1/Buku%202022%20-%20Ekonomi%20Politik.pdf>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/14/200300265/menilik-proyek-food-estate-di-indonesia-yang-disebut-jokowi-dalam-pidato?page=all> Diakses pada tanggal 8 Desember 2023
- <https://www.theguardian.com/society/2020/jun/09/world-faces-worst-food-crisis-50-years-un-coronavirus> Diakses pada tanggal 8 Desember 2023
- Lasminingrat, Lula & Efriza. Desember 2020, Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi Antisipasi Krisis Pangan Indonesia, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 10 Nomor 3.
- Napitupulu, Heri, et al. Juni 2022, "The Dynamics of Involvement of The Indonesian National Army in Food Estate Policy for National Food Security", *Baltic Journal of Law & Politics*, Volume 15 Nomor 1.
- Nurjaman. A. (2020). *Ekonomi Politik Dalam Teori dan Praktek*. Malang : UMM Press.